

# Sikap Diskriminatif Donald Trump terhadap Isu Rasial dan Etnis Menjelang Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020

Giovanna Pramudita Pawestri<sup>1</sup>, I Ketut Putra Erawan<sup>2</sup>, Kadek Dwita Apriani<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

[giovannapramudita@unud.ac.id](mailto:giovannapramudita@unud.ac.id)<sup>1</sup>, [ketut.erawan@ipd.or.id](mailto:ketut.erawan@ipd.or.id)<sup>2</sup>, [kadek.dwita88@unud.ac.id](mailto:kadek.dwita88@unud.ac.id)<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*The issue of discrimination is still relevant in various parts of the world in this contemporary era. It is undeniable that history plays an important role in how the construction of discrimination can stand firm to this day. One World War II actor, Adolf Hitler, in his various speeches and writings, spread his belief in the purity and superiority of the German race which was believed to be the ruling race / Arya (master race). Meanwhile, in this contemporary era, the 45th president of the United States of America Donald Trump also discriminates against minority identity groups in the United States. This is supported by Donald Trump's policies and several statements containing discriminatory elements during his term as president of the United States of America. The construction of domination of an identity group like what Trump is trying to do is based on political interests. Through power over access, the economy, and social structure will be formed as this also creates gaps against minority identity groups.*

*Keywords: Discrimination, Donald Trump, Identity.*

## PENDAHULUAN

Amerika Serikat umumnya dikenal sebagai negara adidaya dengan masyarakat multikultural, dan sebagai negara tujuan imigran. Meskipun demikian, isu diskriminasi kelompok rasial dan etnis masih menjadi permasalahan yang kompleks bahkan hingga masa di era kontemporer. Sejarah melatarbelakangi bagaimana Amerika Serikat menjadi seperti hari ini. Sejatinya, Amerika Serikat telah menciptakan

Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat tanggal 4 Juli 1776 sebagai pengakuan terhadap hal-hal mendasar yang dimiliki manusia.

Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat sangat mendasari nilai-nilai kemanusiaan, bahwa sejatinya setiap individu diberkahi dengan hak yang setara dan tak dapat diambil siapapun juga. Seiring perkembangannya, isu kemanusiaan di Amerika Serikat menjadi perhatian dunia,

dimana terjadi kebijakan-kebijakan bersifat diskriminatif yang menciptakan ketidakadilan terhadap kelompok ras maupun etnis tertentu.

Kehadiran Undang-Undang Imigrasi tahun 1882 *Chinese Exclusion Act*, diusung oleh presiden AS saat itu, Chester A. Arthur, pertama kalinya dan satu-satunya Amerika Serikat menanggukkan pembatasan imigrasi kebangsaan tertentu ke negaranya. Imigrasi besar-besaran Cina ke Amerika Serikat di tahun 1880-an disebabkan oleh fenomena *California Gold Rush* (Demam Emas California) dimana salah satu pengrajin menemukan emas di pegunungan California. Para imigran Cina yang telah menguasai lahan pertambangan membuat warga negara Amerika kalah bersaing. Timbullah sentimen dan diskriminasi terhadap orang Cina, terciptalah istilah 'yellow peril' atau bahaya kuning. Istilah ini merupakan sebutan bagi orang kulit kuning, ras Asia Timur, sebagai marabahaya yang hendak menginvasi dunia. *Chinese Exclusion Act* disahkan kongres selama 10 tahun lamanya dan disambung dengan kebijakan baru yaitu Geary Act tahun 1892. Kebijakan tersebut mewajibkan imigran Cina untuk membawa sertifikat atau wajah pengenalan deportasi. Hanya mereka yang bekerja sebagai pengajar, diplomat, pelajar dan turis biasa yang diberikan akses masuk. Secara garis besar, ketetapan tersebut melarang imigran dari Cina serta menolak pemberian kewarganegaraan kepada kelompok penduduk Cina yang sudah menetap. Diskriminasi semakin menjadi dan merambat ke dalam berbagai bentuk

pembatasan secara hukum dan sosial oleh pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat. Kebijakan *Chinese Exclusion Act* sendiri disebut sebagai produk gerakan anti-Cina, yang merupakan minoritas di Amerika.

Tak hanya sentimen anti-Cina, sentimen anti-Islam berkembang hingga di masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Di tahun 2017 lalu, Presiden Trump mengeluarkan kebijakan yang melarang masuknya tujuh negara Islam ke Amerika Serikat selama 90 hari, selain itu memangkas jumlah pengungsi yang diterima, sebelumnya berjumlah 110.000 kini menjadi 50.000. Isu imigran muslim telah menjadi dampak dari konflik bersenjata di Irak, Libya dan Suriah sehingga beberapa negara melakukan intervensi secara terbuka, salah satunya Amerika Serikat. Meski Presiden Donald Trump menegaskan bahwa kebijakan ini diperlukan demi keamanan negara, narasi yang terbentuk di media massa mengkritik kebijakan dengan menganggapnya produk sentimen anti-Islam Amerika.

Sikap Presiden Donald Trump yang menaruh prasangka terhadap kelompok minoritas dan bersifat diskriminatif dapat berpengaruh terhadap hasil pemilihan presiden Amerika Serikat 2020. Terlebih, aksi besar-besaran terjadi atas kematian George Floyd dengan tagar Black Lives Matter yang terjadi di pertengahan tahun 2020. Masih samar untuk dipastikan apakah aksi BLM ini ditanggapi beberapa pihak demi kepentingan politik, namun kejadian tersebut jelas berdampak pada citra politik Donald Trump saat pemilihan presiden pada

Desember lalu didukung dengan kebijakan dan sebutan yang kerap dilontarkan Donald Trump yang mengandung unsur diskriminatif.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Pada penelitian “Sikap Diskriminatif Presiden Donald Trump terhadap Isu Rasial dan Etnis Menjelang Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020,” peneliti menggunakan beberapa kajian riset terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan isu, guna membentuk kerangka berpikir dalam penelitian ini.

Adapun kajian terkait kebijakan *Travel Ban Executive Order* yang ditulis oleh Muhammad Arraf Rezkia Rachman dalam *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* menjadi salah satu kajian yang menjadi referensi dalam penelitian. Isu diskriminatif dalam kebijakan ini didasari oleh prasangka. Prasangka tersebut membentuk tindakan aktor politik seperti Trump, dimana hal tersebut juga berdampak bagi keberagaman sebuah negara. Meskipun demikian, tak dipungkiri kebijakan *Travel Ban Executive Order* tidak mendasar. Sebab, apabila tragedi teror 11 September di Amerika Serikat yang menjadi pemicu terbitnya kebijakan tersebut, beberapa negara pelaku teror yang lolos dari target kebijakan.

Menelusuri bagaimana tindakan diskriminatif yang bermula dari prasangka, peneliti berusaha memahami dominasi identitas melalui teori dominasi sosial. Sidanius dan Pratto mengungkapkan teori ini dibentuk untuk memahami beberapa mekanisme suatu hirarki sosial dibentuk dan

dipertahankan. Teori ini berasumsi bahwa terdapat proses pembentukan dan pemeliharaan prasangka juga diskriminasi terhadap kelompok yang didominasi. Menyangkut pembahasan dalam makalah ini, sikap diskriminatif rasial dan etnis Presiden Donald Trump dipengaruhi oleh satu dari banyak faktor salah satunya pemeliharaan prasangka terhadap

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Peneliti memilih metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Hal ini dilatarbelakangi oleh kemampuan dari metode deskriptif kualitatif yang mampu memotret dan menjelaskan sebuah fenomena melalui pengumpulan data yang luas dan mendalam. Sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk mendalami data penelitian yang berjudul “Sikap Diskriminatif Donald Trump terhadap Isu Rasial dan Etnis Menjelang Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020” ini. Sebagaimana disebutkan, bahwa penelitian kualitatif tidaklah menitikberatkan pada banyaknya (kuantitas) data, melainkan kedalaman (kualitas) data (Rachmat, 2006: 56).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kontestasi politik Amerika Serikat tahun 2020 lalu menuai perhatian dari seluruh penjuru dunia. Sebagai negara berpengaruh di dunia internasional, kemenangan satu aktor dalam hal ini akan berdampak secara multi dimensi, setidaknya dalam periode empat tahun jabatan sebagai Presiden Amerika Serikat.

Pemilihan Presiden ke-59 Amerika Serikat yang diselenggarakan 3 Desember lalu mengusung dua kandidat. Partai demokrat mengusung mantan wakil presiden Joe Biden dengan wakilnya Kamala Harris, melawan presiden petahana Donald Trump dengan wakilnya Mike Pence. Hasil akhir menunjukkan petahana Donald Trump harus kalah dari Joe Biden, dengan lebih dari 80 juta suara, rekor terbesar sepanjang sejarah dalam pemilu melawan petahana semenjak 1932 silam (Elizabeth, 2020).

Pemilihan Presiden Amerika Serikat ini dikhawatirkan berpengaruh pada sektor ekonomi. Para pengamat menganalisa implikasi kebijakan pemenang yang akan berpengaruh terhadap lonjakan atau turunnya harga saham. Terlebih, beberapa waktu setelahnya, pandemi Covid-19 merebak dan menyebabkan guncangan perekonomian di berbagai negara.

Presiden AS Donald Trump, yang kala itu masih menjabat di kursi presiden tentunya perlu mencetuskan kebijakan yang dapat menekan angka penularan pandemi. Namun rekam jejaknya berkata sebaliknya. Narasi yang dibangun Donald Trump di publik secara terang-terangan mengelak himbauan organisasi kesehatan dunia (WHO) terkait Covid-19 dan menyepelkan eksistensi virus. Donald Trump menyebutkan Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan kematian terendah, faktanya Amerika Serikat menduduki peringkat 9 negara dengan angka kematian tertinggi akibat Covid-19. Bersamaan dengan narasi kontroversial

Trump yang mengandung unsur diskriminatif selama pandemi menjadi isu utama dalam pemilihan presiden tahun 2020 lalu.

Sentimen anti-Cina seakan semakin dinormalkan terutama ketika Donald Trump menyebutkan virus corona sebagai 'virus cina' dan 'kung-flu' dalam kampanye di Tulsa pada bulan Juni lalu (Nakamura, 2020). Pernyataan Trump dan sekutunya tersebut melanggar himbauan WHO untuk tidak menggunakan lokasi geografis saat menyebut penyakit, karena nama-nama sebelumnya telah memicu reaksi terhadap pemerintah juga memicu kebencian pada suatu kelompok. Keputusan WHO ini berdasarkan pengalaman beberapa penyakit sebelumnya seperti orang Amerika Haiti disalahkan atas penyakit HIV, orang Amerika Jerman disalahkan atas pandemic influenza di tahun 1918 dan orang Amerika Meksiko disalahkan atas flu babi di tahun 2009 silam. Adapun tindakan diskriminatif lainnya yaitu pembatalan visa yang terjadi pada lebih dari 1.000 mahasiswa dan peneliti dari Cina. Menurut juru bicara Kementrian Luar Negeri Cina, hal ini merupakan pembatalan sepihak dan melanggar hak asasi manusia.

Isu diskriminasi di Amerika Serikat semakin menguat menjelang pemilihan presiden dengan kematian George Floyd pada 25 Mei yang lalu. Menurut berbagai sumber, meninggalnya George Floyd disebabkan oleh salah satu polisi berkulit putih Kota Minneapolis yang menginjak lehernya dengan lutut. Meskipun Kota Minneapolis dikenal sebagai kota yang kaya

kultur, tak dipungkiri bahwa terdapat kesenjangan di bidang pendidikan dan kesehatan. Profesi aparat sipil seperti polisi didominasi oleh orang berkulit putih, dan tercatat terdapat laporan praktik diskriminatif para kepolisian Minneapolis.

Usai berita meninggalnya George Floyd tersebar, Kota Minneapolis dikerumuni massa yang menggelar aksi atas kebrutalan polisi terhadap George Floyd. Meluas ke daerah lain seperti Washington DC, Atlanta, New York, dan pada akhirnya mencapai 140 kota di Amerika Serikat. Tak hanya meluas secara domestik, aksi protes isu rasisme ini juga meluas ke berbagai negara yang ikut unjuk rasa, disertai slogan dan tagar "*Black Lives Matter*" mewarnai media sosial selama beberapa waktu. Presiden Donald Trump menanggapi aksi ini sebagai kekerasan dan mendoktrinasi anak-anak. Terlebih pada saat aksi, Perdana Menteri Amerika Serikat memilih diam tanpa respon sedikit pun. Respon para petinggi negara berpengaruh pada penanganan hukum *Black Lives Matter* yang tidak berujung tanpa penyelesaian seadil-adilnya.

Teori dominasi sosial merupakan teori yang menyangkut bagaimana masyarakat yang mendominasi, dapat berbasis kelompok hirarki kelompok sosial seperti etnis, agama, kebangsaan atau ras. Kelompok sosial yang mendominasi setidaknya memegang kekuasaan atau menikmati hak istimewa diantaranya kekuasaan politik, kekayaan, jabatan, dan keistimewaan materiil lainnya. Asumsi dari teori ini menganggap bahwa manusia berkecenderungan memiliki perasaan

prasangka terhadap orang diluar kelompoknya (Sidanius & Pratto, 1999). Pemeliharaan prasangka inilah dapat menimbulkan sikap diskriminatif terhadap sesama individu maupun antar kelompok.

Dalam diskriminasi, terdapat beberapa tingkatan seperti individu, lembaga atau proses kolaborasi antar kelompok. Sikap diskriminatif Presiden Trump dalam menanggapi virus corona ataupun aksi *Black Lives Matter* dapat tergolong diskriminasi individu. Kelompok ras dan etnis minoritas di Amerika Serikat, seperti *Chinese-American*, dan orang berkulit gelap dianggap sebagai out-group. Trump, termasuk in-group sebagai orang kulit putih. Donald Trump yang memiliki kekuasaan individu, ia memiliki nilai-nilai sosial yang positif dan hanya menyalurkannya kepada hierarki kelompoknya sebagai anggota in-group, sebaliknya, ia juga memastikan nilai-nilai negatif yang disalurkan kepada hierarki diluar kelompoknya, out-group. Tersirat melalui sikap dan pernyataan yang diucapkan Presiden Trump dalam dua kasus tersebut, seperti menyebut COVID-19 merupakan virus cina dan menuduh aksi *Black Lives Matter* merupakan aksi kekerasan yang dapat mendoktrin anak-anak. Prasangka buruk Donald Trump terhadap out-group menambah rekam jejak isu diskriminasi dan dapat digunakan sebagai senjata Joe Biden untuk memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020.

Kasus George Floyd dan istilah virus cina bersamaan dengan diskriminasi

rasial yang sistemik. Dampaknya yang multi-dimensi, secara khusus dalam aspek ekonomi dan pendidikan, yang sebenarnya sudah cukup lama terdapat disparitas menyangkut perekonomian dan pendidikan orang kulit hitam dan orang kulit putih Amerika Serikat. Selama pandemic kesenjangan tersebut semakin terlihat. Adapun hasil penelitian the Economic Policy Institute (EPI) yang mencatat bahwa persentase pengangguran di komunitas kulit hitam mencapai 16,8% dan kulit putih 14,2% selama pandemi.

## KESIMPULAN

Ketegangan isu diskriminasi yang terjadi menjelang pemilu AS di kalangan masyarakat salah satunya disebabkan sikap diskriminatif Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat. Ia bersikap acuh tak acuh terhadap kasus yang menimpa George Floyd dan terang-terangan dalam kampanyenya menyebutkan COVID-19 merupakan virus cina yang telah dilarang Organisasi Kesehatan Dunia untuk menyebutkan nama lokasi dalam penyebutan nama wabah.

Donald Trump, sebagai in-group di Amerika Serikat, cenderung untuk mempertahankan konstruksi kekuasaannya dengan memperjauh jarak antara orang kulit putih dengan rasa tau etnis lainnya. Kecenderungan individu dalam melihat “perbedaan” berpotensi menimbulkan stigma berkonotasi negatif yang akhirnya berdampak langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Dominasi yang dimiliki orang kulit putih di Amerika Serikat

merupakan realitas yang telah diketahui selama berabad-abad dan berujung pada kesenjangan sosial ekonomi. Salah satu kesenjangan yang terlihat yaitu aspek perekonomian antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam Amerika Serikat.

## DAFTAR PUSTAKA

BBC News Indonesia. (2020). *Covid-19 dan pernyataan-pernyataan Donald Trump, dari 'suntikan disinfektan matikan virus corona dalam semenit' hingga angka 'kematian AS yang rendah'*. Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-54416297> diakses pada 4 Januari 2021

Elizabeth. (2020). Joe Biden Crosses 80 Million Votes. Newsweek.com, [newsweek.com/joe-biden-crosses-80-million-votes-10-million-more-obama-got-1549612](https://www.newsweek.com/joe-biden-crosses-80-million-votes-10-million-more-obama-got-1549612) diakses pada 3 Januari 2023

Hadi Setia Tunggal. (2002). *Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Azasi Manusia (Universal Declaration of Human Right)*. Jakarta: Harvarindo. p. iv.

Islam, Gazi. (2014). *Social Dominance Theory*. Institute of Education and Research, France [https://www.researchgate.net/publication/281208340\\_Social\\_Dominance\\_Theory](https://www.researchgate.net/publication/281208340_Social_Dominance_Theory) diakses pada 4 Januari 2023

National Archives. *Declaration of Independence: A Transcription*. America's Finding Documents. <https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript> diakses pada 1 Januari 2023

Sakinah, Kiki. (2020). *Larangan Trump Negara Muslim Masuk Amerika Serikat Didugat*. Diakses melalui [Republika.co.id, https://republika.co.id/berita/qbnc9o320/larangan-trump-negara-muslim-masuk-amerika-serikat-digugat](https://republika.co.id/berita/qbnc9o320/larangan-trump-negara-muslim-masuk-amerika-serikat-digugat) pada 2 Januari 2023

Sidanius, J. & Pratto, F. (1999). *Social dominance: An intergroup theory of social*

hierarchy and oppression. New York, NY :  
Cambridge University Press.

Staff History.com. (2018). *Chinese Exclusion Act*. Diakses melalui History.com, <https://www.history.com/topics/immigration/chinese-exclusion-act-1882> diakses pada 2 Januari 2023